

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan asas dekonsentrasi di Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti awal mulai diterapkan, namun yang jelas sejak tahun 1903 Pemerintah Hindia Belanda di samping telah melaksanakan asas desentralisasi juga telah melaksanakan asas dekonsentrasi berdasarkan *Decentralisatiewet* 1903. Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah memberikan aturan yang jelas mengenai pemerintahan di daerah yaitu dalam pasal 18. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 menyebutkan, wilayah negara dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah diwajibkan melaksanakan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan asas tugas pembantuan (Soehino, 1991: 1).

Ni'matul Huda sebagaimana dikutip Santoso (2015: ix) menjelaskan, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan yang sebelumnya sentralistik telah berubah menjadi desentralistik, yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Konsekuensi logis dari paradigma tersebut adalah lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berpengaruh terhadap

kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga pemerintahan dipusat dan daerah. Kebijakan otonomi akan berdampak pada pemberian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan dari masyarakat di daerah tersebut (Istiqomah, 2013: 1).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi pemerintahan. Peraturan tersebut merupakan wujud dari aktualisasi isi pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara desentralisasi (Maksoel, 2008: 58). Perangkat hukum baru tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa (Anonymous, 2013).

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem pemerintahan di tingkat desa perlu juga dibangun *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa yang dipresentasikan melalui kelembagaan BPD dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan desa. Terwujudnya *good governance* tidak lepas dari peranan kelembagaan BPD terutama pada kinerja para anggota. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi,

yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja juga dapat dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sebuah organisasi atau perusahaan, didalamnya terdiri dari beragam individu yang tergolong dari berbagai status yang mana status tersebut berupa pendidikan, kelas sosial dan pekerjaan, status perkawinan, pengalaman, jens kelamin, tingkat pengeluaran, serta tingkat usia dari masing-masing individu tersebut (Hasibuan, 2007: 10).

Mengingat pentingnya sumber daya manusia pada sebuah perusahaan maupun organisasi, maka tepatlah jika instansi mempertimbangkan aspek pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia (karyawan instansi) dalam hal ini adalah anggota BPD, sebab anggota BPD mempunyai motivasi yang kuat untuk bekerja adalah keunggulan kompetitif dari instansi atau organisasi. Kapabilitas, keahlian dan kepandaian anggota BPD tidak berarti apa-apa untuk instansi jika anggota enggan bekerja keras dengan memanfaatkan kapabilitas, keahlian dan kepandaian tersebut. Oleh sebab itu motivasi merupakan hal yang berharga, sebab motivasi yang dimiliki setiap individu dapat mendorong anggota bersedia untuk bekerja keras dan bersemangat dalam menggapai produktivitas kerja dalam hal ini intensitas partisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Rivai (2009: 837) menjelaskan, motivasi adalah serangkaian

tindakan dan nilai (*value*) yang berpengaruh terhadap individu guna meraih perihal tertentu yang bersesuaian dengan tujuan individu.

Keberhasilan manajemen suatu organisasi ditentukan oleh kesuksesan dalam manajemen sumber daya manusia. Salah satu maksud dan tujuan dari komitmen yang dibuat oleh para pemimpin adalah bahwa karyawan memiliki motivasi tinggi untuk organisasi sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan dan tujuan organisasi dari satu pihak dapat tercapai. Minner sebagaimana dikutip Sopiah (2008: 156), mengatakan tingginya komitmen karyawan yang kuat akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Faktor yang menentukan kualitas tenaga kerja antarlain kepintaran, kepribadian, bakat, kualitas fisik, tingkat pendidikan, etos kerja, dan disiplin kerja.

Berdasarkan struktur pendidikan, posisi pekerja di Indonesia kurang baik, sebab sebagian besar pekerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah, kualitas etos kerja dan disiplin pekerja dipandang beberapa ahli masih rendah. Prestasi kerja sebenarnya adalah salah satu faktor utama dalam rangka mengembangkan organisasi yang efektif dan efisien. Hasibuan (2007: 94) menyatakan, prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai dalam melakukan tugas-tugas yang ditugaskan untuk itu didasarkan pada keterampilan, pengalaman, dan keseriusan waktu.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa desa merupakan wilayah otonomi yang berada dibawah, sehingga memiliki kewenangan penuh untuk menentukan prioritas maupun sasaran apa yang akan dibangun oleh masyarakat desa itu sendiri. Seiring dengan bergulirnya demokrasi,

didalam penyelenggaraan pemerintahan desa pun sedikit banyak mengalami perubahan. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh keadaan masyarakat desa yang terus berkembang, begitupun kebutuhan masyarakat desa. Kebutuhan yang semakin kompleks dan terus berkembang menuntut adanya Badan Permusyawaratan Desa yang solid untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat desa. Perkembangan keadaan ini mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa untuk semakin mengoptimalkan kinerja agar menjadi lebih baik. Hal tersebut tentunya agar mampu menciptakan ide-ide berkualitas dan demi terwujudnya pembangunan partisipatif yang merata di setiap daerah.

B. Identifikasi Masalah

Keberadaan Badan Permusyawaratan Rakyat dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan ini diwujudkan dengan penyaluran aspirasi masyarakat desa, sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif yang bertugas menampung aspirasi rakyat. Demi terwujudnya fungsi lembaga legislatif yang sesuai dengan tuntutan zaman dan undang-undang maka dibutuhkan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa yang semakin baik. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa antara lain: sumber daya anggota BPD yang berupa latar belakang pendidikan formal, motivasi bekerja, pengalaman berorganisasi, kelengkapan sarana prasarana, ketersediaan sumber dana operasional, proses komunikasi dua arah baik secara vertikal maupun horizontal, kepemimpinan,

keadaan sosial masyarakat, keadaan geografis wilayah desa, proses pengambilan keputusan dan koordinasi antar anggota organisasi (Ramayanti, 2008: 67).

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dibutuhkan agar masalah yang diteliti tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ditentukan, sehingga permasalahan yang dianalisa dapat terarah, sesuai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Intensitas partisipasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan merupakan tenaga yang dikerahkan untuk suatu usaha keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan. Adapun indikatornya ialah masukan, proses, dan keluaran sedangkan pengukurannya dengan membandingkan pelaksanaannya sekarang dengan targetnya.
2. Latar belakang pendidikan formal adalah jenjang pendidikan formal (SD, SMP, SMA, S1, S2, S3) terakhir yang ditempuh oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Motivasi merupakan sesuatu yang menjadi penyebab, mendistribusikan dan *mensupport* sikap dan tindakan individu, sehingga ia akan bekerja dengan tekun dan semangat untuk meraih hasil yang optimal. Indikator motivasi adalah *maintenance factor* dan *motivation factors*.

4. Pengalaman berorganisasi berasal dari organisasi yang pernah atau sedang di ikuti oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, baik itu organisasi politik, sosial maupun dalam tingkat sekolah.

D. Rumusan Masalah

Menurut Arikunto (2010: 36), perumusan masalah adalah beberapa pertanyaan yang akan terjawab setelah tindakan selesai dilakukan. Setiap peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu pokok permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh positif latar belakang pendidikan formal terhadap intensitas partisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pada anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo?
2. Adakah pengaruh positif motivasi bekerja terhadap intensitas partisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pada anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo?
3. Adakah pengaruh positif pengalaman berorganisasi terhadap intensitas partisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pada anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo?

4. Adakah pengaruh positif latar belakang pendidikan formal, motivasi bekerja, dan pengalaman berorganisasi terhadap intensitas partisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pada anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dan terukur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang pendidikan formal pada anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Mengetahui motivasi bekerja pada anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
3. Mengetahui pengalaman berorganisasi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
4. Mendeskripsikan keterkaitan latar belakang pendidikan formal, motivasi bekerja, dan pengalaman berorganisasi terhadap intensitas partisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pada anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya suatu tujuan. Kegunaan suatu penelitian umumnya ada dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi dan memecahkan masalah yang ada. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan tentang intensitas partisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pada anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Menambah wawasan mengenai keterkaitan latar belakang pendidikan formal terhadap intensitas partisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pada anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Menambah wawasan mengenai keterkaitan motivasi bekerja terhadap intensitas partisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pada anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Menambah wawasan mengenai keterkaitan pengalaman berorganisasi terhadap intensitas partisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pada anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Menambah wawasan mengenai keterkaitan latar belakang pendidikan formal, motivasi bekerja, dan pengalaman berorganisasi terhadap intensitas partisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pada anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- f. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Instansi Badan Permusyawaratan Desa

- 1) Meningkatkan intensitas partisipasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pada anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Meningkatkan motivasi bekerja pada anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Bahan evaluasi kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Menentukan langkah untuk meningkatkan intensitas partisipasi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 5) Menentukan langkah untuk meningkatkan motivasi bekerja pada anggota Badan Permusyawaratan Desa.

b. Manfaat bagi peneliti

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keterkaitan latar belakang pendidikan formal, motivasi bekerja, dan pengalaman berorganisasi terhadap intensitas partisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Menambah pengetahuan mengenai keadaan birokrasi yang sebenarnya serta menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari saat berada di bangku kuliah.